

---

## **PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA MONANO KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO**

**Tety Thalib**  
**STIA Bina Taruna Gorontalo**  
[tetythalib72@gmail.com](mailto:tetythalib72@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang program pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK Desa Monano Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada program pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK dalam meningkatkan pendapatan melalui kegiatan yang dapat menggambarkan, memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung, mengevaluasi program, cara-cara yang digunakan, dan mengidentifikasi penerapan kebijakan program dengan jelas. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: Program PKK belum menggambarkan kenyataan sebenarnya bahwa keluarga kaum perempuan telah memperoleh program yang dapat mensejahterkan keluarganya. Belum memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga kaum perempuan. Belum dievaluasi secara berkesinambungan sehingga kurang memiliki dampak manfaat bagi kemandirian kaum perempuan. Belum menerapkan dengan baik cara-cara yang digunakan sebagai metode dalam melaksanakan program yang dapat dipahami secara baik oleh kaum perempuan. Belum maksimal mengidentifikasi penerapan kebijakan program pemberdayaan dengan jelas tentang permasalahan yang dihadapi kaum perempuan. Berdasarkan hasil kesimpulan maka disarankan perlunya setiap program pemberdayaan perempuan di organisasi PKK, dapat mengidentifikasi penerapan kebijakan program pemberdayaan dengan jelas tentang permasalahan yang dihadapi kaum perempuan secara maksimal.

**Kata Kunci: Program, Pemberdayaan, Perempuan, Kesejahteraan, Keluarga**

---

### **PENDAHULUAN**

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menjamin “kesejahteraan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Meningkatnya

kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran keberhasilan pembangunan, dan bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fisik.

Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan yang pro-kerakyatan, anti kemiskinan, dan anti kesenjangan. Pembangunan adalah

gerakan yang tidak sederhana, melainkan sangat kompleks dan multidimensional untuk mendayagunakan segenap sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan sumberdaya budaya yang ada. Sebagai sebuah cita-cita, pembangunan ditunjukkan untuk menjawab setiap kebutuhan manusia, apakah itu kebutuhan fisik-ekonomi, mental-spiritual, atau politik-sosial.

Dengan demikian, pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai bagaimana meningkatkan pendapatan tersebut. Salah satu cara yang dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini, antara lain melalui organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Melalui organisasi tersebut, pembangunan mensejahterakan masyarakat miskin dilakukan dalam suatu gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri. Adapun program yang tercantum dalam gerakan tersebut meliputi tugas dan fungsi yang tertuang dalam 10 (sepuluh) Program Pokok PKK terdiri dari: penghayatan dan pengalaman Pancasila, gotong royong, pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Program pembangunan mensejahterakan masyarakat melalui organisasi PKK tersebut, sudah dilaksanakan sejak tahun 1972

berdasarkan surat kawat Mendagri No.SUS.3/6/12, tanggal 27 Desember 1972. Pada saat itu, organisasi PKK masih diterjemahkan sebagai Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Di era reformasi saat ini, dimana paradigma baru pembangunan melalui otonomi daerah telah melahirkan pokok-pokok kesepakatan antara mengubah nama organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di singkat PKK.

Melalui organisasi tersebut, berbagai program yang disusun untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah perdesaan. Program-program yang telah digulirkan menggunakan pendekatan pemberdayaan. Dalam kegiatannya, program pemberdayaan diarahkan pada 10 (sepuluh) program PKK yang pada intinya meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kesadaran kaum perempuan agar potensi yang dimilikinya, mampu mengubah dirinya dan keluarganya kearah peningkatan pendapatan

Seperti halnya di Desa Monano Kecamatan Bone Kabupaten Bone bolango, kebijakan program antara lain melalui pengembangan kehidupan berkoperasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan atas dukungan bantuan dana subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, yang dialokasikan melalui anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, juga didukung melalui dana perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk menunjang aktivitas kaum perempuan yang berkecimpung di

bidang usaha kecil mikro seperti warung, dan kios.

Program yang selama ini sudah dilakukan, sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan kaum perempuan yang tergabung dalam organisasi PKK dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu. Dengan demikian diharapkan keluarga kaum perempuan di Desa Monano dapat mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana program pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK Desa Monano Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango?

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang program pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK Desa Monano Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis: dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam

pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya ilmu administrasi publik, menyangkut masalah kebijakan program peranan perempuan, dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara aplikatif dan berkelanjutan.

2. Secara praktis: dapat memberikan rekomendasi sebagai masukan bagi para pembuat dan pengambil kebijakan di Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, dalam rangka penyusunan program-program yang lebih menyentuh kehidupan keluarga khususnya kaum perempuan dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi.

Penelitian ini difokuskan pada program pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK dalam meningkatkan pendapatan melalui kegiatan yang dapat menggambarkan, memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung, mengevaluasi program, cara-cara yang digunakan, dan mengidentifikasi penerapan kebijakan program dengan jelas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kegiatan Yang Dapat Menggambarkan

Kegiatan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dapat menggambarkan kondisi sebenarnya yang dihadapi oleh keluarga kaum perempuan. Program pemberdayaan perempuan melalui organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Monano belum memperoleh perhatian dari Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah. Umumnya masyarakat memperoleh program pemberdayaan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam bentuk dana bergulir. Kegiatannya pun berkisar pada pemberian bantuan dana bergulir, dan pekerjaan infrastruktur desa yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan, upaya pengurus organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) selama ini belum maksimal memberikan motivasi bagi kaum perempuan untuk dapat merubah nasibnya. Selain kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap nasib kaum perempuan agar dapat bangkit kembali dalam meningkatkan kemandiriannya, belum ada program-program yang dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dalam mengaktualisasikan potensinya.

Berdasarkan pernyataan informan, menunjukkan masih sulitnya kaum perempuan di Desa Monano untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Usaha

keluarga di sektor pertanian belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal untuk meningkatkan pendapatannya. Pembinaan organisasi terhadap anggota menyangkut perubahan sikap, perilaku dan kesadaran kaum perempuan agar berperan aktif dalam setiap berbagai kegiatan, selama ini sangat minim. Berdasarkan pengamatan, program pembinaan anggota yang sudah pernah dilaksanakan oleh organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), melalui kegiatan ceramah dan pelatihan, tidak pernah mengalami kelanjutan.

Kenyataan yang dihadapi keluarga kaum perempuan, yaitu belum mampu meningkatkan pendapatan dari usaha pertanian. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga belum berhasil memberikan gambaran tentang kondisi sebenarnya yang dihadapi oleh keluarga kaum perempuan. Dalam arti, sikap dan perilaku mereka belum mengalami perubahan walaupun Pemerintah telah memberikan berbagai bantuan program, baik melalui PNPM maupun program pemberdayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), belum mampu berfungsi sebagai mediator kaum perempuan dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Kaum perempuan petani merupakan kelompok yang paling terpengaruh oleh situasi ekonomi karena mereka tidak memiliki sarana finansial yang memadai untuk belajar dari pengalaman. Rendahnya tingkat pendidikan membuatnya tetap tertinggal, karena tidak dapat

melakukan sesuatu yang membuat dirinya mengalami kemajuan. Mereka membutuhkan pendidikan untuk mengetahui kesehatan anak-anaknya dan mempelajari kandungan gizi berbagai makanan. Minimnya pendidikan membuat dirinya hidup dalam kesederhanaan, sehingga sikap dan perilakunya terhadap setiap kegiatan yang akan dilakukan selalu mengalami hambatan. Jika ada kegiatan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pertimbangan utama adalah keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kondisi keluarga di Desa Monano ini sejak terbentuknya hingga saat ini belum ada perubahan yang mendasar terutama dari segi peningkatan ekonomi.

### **Memiliki Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung**

Memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu kegiatan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga kaum perempuan. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas, program-program pemberdayaan perempuan selama ini belum dapat menggambarkan keadaan kondisi kaum perempuan di desa Monano. Oleh karena itu, belum ada program yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekonomi mereka.

Berdasarkan pengamatan, belum ada usaha kreativitas warga dan kaum perempuan di desa Monano yang dapat dibanggakan

sebagai hasil dari program pemberdayaan masyarakat baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun melalui usaha organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Peran kaum perempuan lebih dominan mengurus rumah tangganya daripada kegiatan di luar yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraannya.

Program-program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang tercantum dalam 10 program yang umumnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga. Kaum perempuan diharapkan selalu berpartisipasi melalui organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai wadah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah belum memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan keluarga. Itu sebabnya kaum perempuan tersebut sulit diajak berpartisipasi dalam program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Memudarnya tingkat kepercayaan terhadap pengurus dan aparat Pemerintah Desa menyangkut program-program pemberdayaan perempuan, sehingga kaum perempuan terutama ibu-ibu enggan untuk memberikan kontribusi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi PKK.

### **Mengevaluasi Program**

Mengevaluasi program yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu kegiatan program Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dievaluasi secara maksimal kegiatannya. Selama ini belum ada tindakan dari Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kabupaten mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Desa. Kegiatan evaluasi biasanya hanya dirangkaikan dengan kegiatan Pemerintah pada saat ada kunjungan Bupati ke desa-desa.

Berdasarkan pengamatan, selama ini mulai pengurus, anggota PKK hingga ibu-ibu yang tergabung dalam Pokja-Pokja selalu mengharapkan agar Pemerintah dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki tingkat kehidupan keluarganya. Tingkat ekonomi yang masih memprihatinkan merupakan hambatan utama bagi kaum perempuan di Desa Monano dalam melibatkan diri dalam setiap kegiatan PKK walau hanya dalam bentuk pikiran dan tenaga.

Tidak adanya evaluasi terhadap program yang dilaksanakan oleh organisasi PKK di Desa Monano, menunjukkan kurangnya program-program yang dilaksanakan selama ini. Pentingnya menempatkan potensi kaum perempuan yang ada di Desa Monano, dalam proses pembangunan akan mempercepat peningkatan kesejahteraan mereka.

Program pemberdayaan sebagai pendekatan baru, lahir dari ketidakpuasan terhadap pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya. Pendekatan pemberdayaan perempuan ini didasarkan pada asumsi bahwa untuk memperbaiki posisi perempuan, dibutuhkan upaya meningkatkan kekuasaan tawar-menawar dalam mengubah nasibnya.

Pendekatan ini meletakkan upaya penghapusan subordinasi perempuan sebagai pusat perhatian. Ini berarti bahwa kesamaan hak ekonomi, hak-hak resmi yang tidak diskriminatif serta hak-hak reproduktif dimasukkan ke dalam agenda pembangunan hingga ke tingkat desa. Untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja pendekatan ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam bagi setiap pengurus PKK dan aparat Pemerintah dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, mengenai kondisi lokal perempuan dan masyarakatnya.

### **Cara-Cara Yang Digunakan**

Cara-cara yang digunakan yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan program dapat dipahami oleh kaum perempuan. Berbagai metode yang sudah diterapkan dalam pemberdayaan perempuan, namun pada praktiknya selalu saja membuat kaum perempuan dalam posisi penerima dan bukan pelaku. Dalam upaya pemberdayaannya, perlu diterapkan metode dan strategi secara bertahap. Pada tahapan awal yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraannya.

Pengamatan selama ini, bagi ibu rumah tangga yang tidak lagi memiliki suami, beban hidupnya bertambah berat selain mengurus rumah tangga, juga harus mencari nafkah di luar rumah. Oleh karena itu, metode atau cara-cara yang digunakan yang paling efektif tidak lain secara berkesinambungan memprogramkan berbagai kegiatan yang dapat memberi nilai tambah secara langsung dapat dirasakan oleh

kaum perempuan. Selam ini, cara-cara seperti itu tidak pernah dilakukan baik oleh Pemerintah Desa, Kecamatan apalagi oleh Pemerintah Kabupaten. Urusan PKK diserahkan seluruhnya kepada organsasinya yang selama ini justru tidak memiliki daya untuk memberdayakan kaum perempuan.

Cara-cara memberdayakan ibu-ibu di Desa dalam setiap program yang dicanangkan, seharusnya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Cara tersebut dapat memberikan akses kemudahan dalam memperoleh program yang dapat menambah pendapatan keluarga. Tahapan berikutnya baru memberi penyadaran melalui berbagai aktivitas yang memungkinkan dirinya tidak mengalami kesulitan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dengan demikian, diharapkan dapat memunculkan partisipasinya secara aktif pada setiap kegiatan program.

Cara-cara lain sebagai tahapan yang perlu dilakukan oleh setiap pengurus dan aparat pemerintah, yaitu dengan selalu melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan guna membentengi dirinya dari hambatan-hambatan yang dialami hingga mencapai kemandirian. Tahapan pemberdayaan seperti itu dalam kerangka program PKK, diharapkan akan membantu terwujudnya tujuan program untuk memenuhi kebutuhan kaum perempuan, baik berupa pemenuhan kebutuhan praktis (jangka pendek) maupun pemenuhan kebutuhan strategis (jangka panjang). Pendekatan pemberdayaan kaum perempuan yang demikian itu

dalam konsep pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip model pembangunan yang bertumpu pada manusia atau masyarakat.

### **Mengidentifikasi Penerapan Kebijakan Program**

Mengidentifikasi penerapan kebijakan program pemberdayaan yang jelas yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu setiap program diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Peran perempuan dalam menerima tanggung jawab melaksanakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), belum nampak seperti misalnya dalam mengidentifikasi penerapan kebijakan program yang tertuang dalam 10 (sepuluh) program PKK. Rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya pendapatan yang diperoleh, merupakan hal yang menghambat pengurus organisasi PKK untuk memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan pengamatan, kegiatan mengidentifikasi penerapan kebijakan program tidak pernah dilaksanakan. Kegiatan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), umumnya nanti ada perintah dari Kecamatan dan Kabupaten seperti ada kunjungan Tim Penggerak PKK baru ada aktivitas. Minimnya aktivitas organisasi juga lebih disebabkan tidak ada jaminan yang tetap berupa insentif yang diterima sebagai imbalan atas kepengurusan.

Para pengurus organisasi PKK lebih mengutamakan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga daripada tanggung jawab sebagai

pengurus organisasi. Walaupun ada program pemberdayaan yang dicanangkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), juga ditujukan bagi anggota PKK, namun hanya pada saat ada pembagian uang sebagai modal usaha, ada kegiatan di PKK. Itupun hanya keadaan terpaksa karena di dorong untuk memperoleh program bantuan pemberdayaan tersebut.

Setiap organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya, sudah tentu membutuhkan anggaran, dan berbagai fasilitas kerja lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program. Jika ketersediaannya tidak memadai, sangat sulit bagi siapapun terutama pengurus organisasi dituntut tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan program. Dewasa ini, tidak mudah mengajak orang lain untuk mau aktif dalam organisasi yang tidak memiliki anggaran.

Demikian pula halnya dengan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pengamatan selama ini para pengurus yang sebagian berstatus sebagai pegawai dan aparat, walaupun mereka memiliki pendapatan dari gaji yang diterimanya sebagai pegawai, namun tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka dengan bekerja di organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), diharapkan kekurangan itu dapat terpenuhi. Jika tidak, maka hal itu jelas akan mempengaruhi semangatnya untuk bekerja. Permasalahan inilah yang sering tidak dipahami oleh Pemerintah sehingga setiap kegiatan perempuan

yang dituntut adalah tanggung jawab sebagai anggota organisasi, namun disisi lain tidak ada perhatian untuk mensejahterakannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas, disimpulkan sebagai berikut: (1) Program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan program PKK, belum menggambarkan kenyataan sebenarnya bahwa keluarga kaum perempuan telah memperoleh program yang dapat mensejahterkan keluarganya; (2) Program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan program PKK, belum memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga kaum perempuan; (3) Program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan program PKK, belum dievaluasi secara berkesinambungan sehingga kurang memiliki dampak manfaat bagi kemandirian kaum perempuan; (4) Program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan program PKK, belum menerapkan dengan baik cara-cara yang digunakan sebagai metode dalam melaksanakan program yang dapat dipahami secara baik oleh kaum perempuan; (5) Program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan program PKK, belum maksimal mengidentifikasi penerapan kebijakan program pemberdayaan dengan jelas tentang permasalahan yang dihadapi kaum perempuan.



## SARAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program pemberdayaan kaum perempuan melalui organisasi PKK di masa mendatang, disarankan sebagai berikut: (1) Perlunya setiap program pemberdayaan perempuan di organisasi PKK, dapat menggambarkan kenyataan sebenarnya kondisi keluarga kaum perempuan; (2) Perlunya setiap program pemberdayaan perempuan di organisasi PKK, memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga kaum perempuan; (3) Perlunya setiap program pemberdayaan perempuan di organisasi PKK, dapat dievaluasi secara berkesinambungan sehingga memiliki dampak manfaat bagi kemandirian kaum perempuan; (4) Perlunya setiap program pemberdayaan perempuan di organisasi PKK, menerapkan dengan baik cara-cara yang digunakan sebagai metode dalam melaksanakan program yang dapat dipahami secara baik oleh kaum perempuan; (5) Perlunya setiap program pemberdayaan perempuan di organisasi PKK, mengidentifikasi penerapan kebijakan program pemberdayaan dengan jelas tentang permasalahan yang dihadapi kaum perempuan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin Zainal Said. 2002. *Kebijakan Publik*. Cet. Pertama. Jakarta: Alfabeta.  
Adi, Ibandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan Pengembangan*

*Masyarakat dan Intersensi Komunitas*, Jakarta Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia

- Amirudin & Ruhyanto, Ari, (Ed). 2004. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Program S2 Politik Lokal dan otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian, Statu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Cet. Ketigabelas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Blau, Peter. M dan Meyer, Marshall. W. 2000. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Darwin, Muhadjir, dan Kusumasari, Bevaola. 2002. *Sensivitas Gender Pada Birokrasi Publik*, Artikel pada Policy Brief No.09/PB/2002. Yogyakarta: CPPS Gadjah Mada University.
- Dedeona, Hendrikus Triwibawanto. 2007. *Akuntabilitas Kelembagaan Eksekutif*. Vol. 4 No 1 Maret 2007. Bandung: Jurnal Ilmu Adminsitrasi, STIA LAN
- Hesel, Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Hogwood, Brian W., and Lewis A. Gunn. 1994. *Policy Analysis for the Real World*. New York: Oxford University Press.
- Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*, Bandung: Blantika

- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Kedua. Bandung: PT.Remadja Rosdakarya.
- Nisbet, J., & Watt, J. 1994. *Studi Kasus, Sebuah Panduan Praktis*, disadur oleh L. Wilardjo. Yogyakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia kerjasama Satya Wacana University Press
- Nugroho, Riant Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pembangunan Indonesia, Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Puspitosari, Hesti, Wahyudi, Imam, dan Kurniawan. Lutfi J. 2006. *Marginalisasi Rakyat dalam Anggarn Publik*. Jakarta: YAPPIKA)
- Pranarka dan Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment), Dalam Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Sen, Amartya. 1999. *Development As Freedom*. New York: Anchor Book, terjemahan
- Siagian, S.P.. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soetomo. 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subagyo, Ahmad Wito. 2000. *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Yogyakarta: UGM.
- Suharto, Edi. 2004. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Rafika Aditama
- Suyatno, Bagog. 1996. *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Lukman Offset
- Thoha, Miftah. 2008. *Tinjauan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah di Indonesia*. Jurnal Politika, Volume 4 No.02:31-46
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004.. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Media Pressindo.